

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Intermediasi Keuangan**

Menurut Gurley (1965), teori intermediasi keuangan membahas tentang salah satu fungsi institusi perbankan, dimana perbankan memiliki tugas besar sebagai penyokong yang dominan dalam perekonomian suatu negara dengan tugas intermediasi dana dari pihak kelebihan dana kepada pihak kekurangan dana. Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu untuk memperlancar proses pembayaran, pencapaian stabilitas keuangan dan sebagai pelaksana kebijakan moneter, maka kondisi perbankan harus tetap stabil.

Fungsi intermediasi keuangan muncul sebagai akibat dari mahalnya biaya monitoring, biaya likuiditas dan risiko harga (*price risk*) karena adanya informasi *asymmetric* antara pemilik dana dengan perusahaan pengguna dana sehingga dibutuhkan pihak perantara (*intermediary*) yang mampu mengakomodir kebutuhan kedua belah pihak (Saunders, 2008). Bikker & Wesseling (2003) juga menyatakan bahwa liberalisasi dan perkembangan teknologi informasi dipasar modal telah menyebabkan fungsi intermediasi beralih dari bank ke pasar modal dan lembaga keuangan *non-intermediary* seperti asuransi. Liberalisasi lembaga keuangan non-bank yaitu terlihat dalam proses memfasilitasi masyarakat untuk menyimpan asset dan melakukan investasi.

Liberalisasi masyarakat melalui kebebasan dalam memilih sarana untuk menyimpan asset. Selain itu perkembangan teknologi telah membantu masyarakat dalam memonitor perkembangan asset mereka dan memberi peluang untuk melakukan diversifikasi atas asset yang dimiliki, sehingga mengurangi *monitoring-cost*. Hal ini yang menyebabkan terjadinya *disintermediation* dalam industri perbankan.

## 2. Teori Stabilitas Sistem Keuangan

Teori Minsky mengenai "*financial instability*" menjadi sangat bermakna penting. Minsky berpendapat bahwa masa-masa stabil akan memicu para investor untuk lebih berani mengambil risiko yang lebih tinggi. Akibatnya, mereka akan cenderung mengambil utang secara berlebihan dan membayar aset-aset investasi dengan harga yang terlalu tinggi. Salah satu pemikiran yang terkenal dari Minsky adalah *Minsky Moment*. Pemikiran ini menjelaskan suatu keadaan yang menunjukkan pergerakan sistem finansial yang lambat dari stabil menuju kerapuhan, diikuti dengan krisis. Minsky dikenal dengan pemikiran-pemikirannya dalam mengatasi suatu krisis. Pada tahun 1973 Keynesian mulai runtuh saat *Bretton Woods System* mengalami keruntuhan yang menyebabkan krisis minyak hampir di seluruh dunia, disisi lain pergerakan uang menjadi salah satu kapital utama.

Menurut Minsky (1970), pada saat kondisi stabil para agen ekonomi ( Bank, perusahaan, rumah tinggal dan lainnya) akan memiliki kepercayaan bahwa kondisi ekonomi yang baik akan terus berlangsung

sehingga mereka mengambil resiko berlebih. Pemikiran Minsky tersebut menjadi salah satu pandangan dalam makroprudensial yang dinamakan sebagai *procyclicality* yaitu suatu fenomena yang memperbesar “*feedback*” antar sistem keuangan maupun sistem keuangan dengan makroekonomi. Dimana fenomena tersebut dapat menyebabkan “*unsustainable boom*”. Saat periode “*boom*” menjadi “*burst*”, *procyclicality* memperbesar kekacauan dan menyebabkan resesi ekonomi mendalam. Pemikiran Minsky tersebut menggambarkan apa yang terjadi pada krisis keuangan di Amerika tahun 2008 maupun periode setelahnya.

Kembali pada teori Minsky mengenai “*Financial Instability*”. Minsky menyumbangkan pemikiran selanjutnya yaitu *Financial Instability Hypothesis* (FIH) (minsky, 1992). Dalam FIH Minsky membagi tiga tahapan hubungan antara hutang dengan unit ekonomi, diantaranya adalah:

a) *Hedge Finance*

Dimana pada tahap ini unit ekonomi mampu membayar cicilan maupun pokok dari hutangnya. Disamping itu, dalam tahap ini para pelaku ekonomi sangat berhati-hati dalam melakukan hutang dan bahkan pelaku ekonomi pada tahap ini cenderung menahan melakukan hutang untuk investasi yang baru.

b) *Speculative Finance*

Dimana pada tahap ini unit ekonomi hanya mampu membayar cicilan saja tetapi tidak dengan pokoknya. Pada akhirnya unit ekonomi

melakukan roll over hutang atau membayar hutang dengan hutang yang lain.

c) *Ponzi Finance*

Pada tahap ini unit ekonomi tidak mampu membayar cicilan maupun pokok dari hutang. Unit ekonomi berharap kepada kenaikan harga aset untuk membayar hutangnya tersebut. Akan tetapi, jika tidak terjadi kenaikan harga aset maka yang dilakukan oleh unit ekonomi adalah menjual aset tersebut dan saat unit-unit tersebut menjual asetnya maka terjadi penurunan nilai aset yang lebih mendalam.

Pada krisis global 2008, Miskhin (2010) juga menjelaskan terkait dengan teori Minsky. Pada krisis global 2008, terjadi peningkatan kredit perbankan pada saat awal krisis keuangan dan cenderung stabil sampai dengan Maret 2008 atau berada pada fase *boom*. Namun, pada pertengahan tahun 2009 terjadi penurunan tren pinjaman pada perbankan, penurunan permintaan untuk pinjaman sebagai akibat dari melemahnya kondisi ekonomi atau berada pada fase *burst*.

### 3. Kerentanan Perbankan

Menurut Hadad, Santoso dan Arianto (2003) bank sangat mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal, karena mereka adalah bagian dari sistem pembayaran. Lebih jauh perbankan sangat mudah goyah karena;

- a. Jumlah uang kas sangat kecil dibandingkan dengan kewajibannya segeranya
- b. Modal bank sangat rendah dibanding kewajibannya dan

- c. Rasio dana pihak ke tiga berjangka pendek sangat besar.

Hampir sama dengan Hadad et al (2003), De Bant et al (2010) menyebut ada tiga faktor yang membuat bank rentan terhadap krisis;

- a. Struktur dari neraca – masalah perbedaan maturitas aset dan kewajiban. Bank lebih banyak mempunyai dana jangka pendek sedangkan pinjaman yang diberikan dalam jangka panjang sehingga ada *mismatches maturity* (Allen dan Gale, 2004). Jika terjadi penarikan dana jangka pendek secara besar-besaran dan *bank run*, bank yang *solvent* pun akan tetapi tidak likuid akan runtuh (Goldstein dan Pouzner, 2005).
- b. Adanya jaringan keterkaitan yang kompleks dari exposure antar bank. Menurut Freixas, Parigi dan Rochet, (2000) hal ini terjadi karena bank memiliki transaksi operasional dalam hal sistem pembayaran, adanya pinjaman antar bank dan adanya transaksi derivatif antar bank. Transaksi tersebut sangat terkait dengan penyediaan likuiditas dan sharing risiko antar bank dan nasabah. Fasilitas pinjaman antar bank (*interbank market*) dapat menyebabkan adanya kegagalan sistemik pada perbankan meskipun semua bank dalam kondisi solven (Freixas et al. 2000). Hal yang sama disampaikan oleh Rochet dan Tirole (1996) bahwa krisis dapat disalurkan oleh interbank market, terjadinya *shock* likuiditas pada satu bank kepada bank lain akibat buruknya adalah penutupan pada keseluruhan sistem pembayaran perbankan.

Hal ini ini juga diperparah oleh keengganan bank skala besar untuk memberi bantuan kepada bank kecil (Acharya *et al.*, 2008). Jika terjadi gagal bayar (*default*), satu bank di transaksi pinjaman antar bank akan berpengaruh ke dalam sistem secara keseluruhan. Begitu juga jika sistem pembayaran yang melibatkan bank secara keseluruhan tidak di kelola dengan baik juga akan berdampak kepada risiko sistematis (Rochet dan Tirole, 1996). Sementara itu faktor lain yang juga masuk pada kategori ini secara simultan akan mengakibatkan terjadinya kesulitan keuangan pada lembaga keuangan/bank adalah karena adanya kerelasi asset antar bank (Suh, 2012). Asset dari bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) saling berhubungan karena mereka terekspos pada industri yang sama (Suh 2012), *terexpose* pada kelas *asset* yang sama (Suh, 2012), *problem* informasi (Suh, 2012) atau pada faktor makro ekonomi (Suh, 2012).

- c. Informasi dan intensitas kontrol dari transaksi kontrak keuangan, dimana kontrak ini tergantung dari janji bayar (*promises*) yang diberikan oleh bank peminjam dan harapan untuk menerima pembayaran tersebut (De Bant *et al*, 2010). Pada saat jatuh tempo bank pemberi pinjaman akan memperpanjang fasilitas bila mereka yakin bahwa peminjam akan membayar kewajiban dimasa datang. Akan tetapi bila bank tidak yakin, dan ada informasi asimetris serta ketidak pastian muncul, maka bank pemberi pinjaman dapat saja

menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas. Hal ini akan menimbulkan kesulitan likuiditas berantai pada industri perbankan.

## **B. Landasan Konsep**

### **1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bankbank umum syariah. Namun demikian, sesuai

UU Perbankan No. 10 tahun 1998, BPR Syariah hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

## **2. Risiko Pembiayaan**

Risiko pembiayaan adalah kerugian potensial yang diakibatkan oleh keadaan dimana debitur tidak mampu dan/atau tidak mau menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. Greuning dan Bratanovic (2011) menjelaskan bahwa hampir semua regulator menetapkan standar pengelolaan risiko pembiayaan yang meliputi identifikasi risiko dan potensi yang ada, mendefinisikan kebijakan yang menggambarkan filosofi manajemen risiko bank serta menetapkan aturan mengenai ukuran/parameter dalam risiko pembiayaan yang akan dikontrol. Ada tiga jenis kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan:

- a. Kebijakan yang bertujuan untuk membatasi atau mengurangi risiko pembiayaan. Yang termasuk dalam jenis pertama adalah kebijakan pada konsentrasi dan pemaparan besar, diversifikasi, pinjaman kepada pihak terkait, dan kelebihan pemaparan.
- b. Kebijakan yang bertujuan mengklasifikasikan asset dengan cara mengevaluasi kolektabilitas portofolio instrument kredit secara berkala.
- c. Kebijakan yang bertujuan untuk kerugian *provisi* atau kebijakan dalam menciptakan tunjangan pada tingkat tertentu untuk menyerap kerugian yang dapat diantisipasi.

### **3. Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF)**

Kuncoro dan Suhardjono (2002) menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah terjadi ketika debitur sudah tidak mampu melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada kreditur seperti perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Siamat (2005) menjabarkan bahwa penetapan kualitas kredit didasarkan pada penilaian yang dilakukan dengan menganalisis faktor prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Lingkungan makroekonomi memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap sektor perbankan. Seperti yang diutarakan oleh Festić dan Bekő (2008) bahwa bahwa eksposur dari faktor risiko makroekonomi merupakan sumber risiko sistemik yang mempengaruhi kinerja sektor perbankan yang dinyatakan sebagai rasio pembiayaan bermasalah terhadap

total pembiayaan. Berikut ini adalah faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah:

**a. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto**

Produk Domestik Bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian” (Mankiw, 2000). Sukirno (2004) mendefinisikan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto sebagai keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut maupun warga negara asing. Sedangkan menurut Lipsey, et al. (1992) Produk Domestik Bruto adalah pendapatan nasional yang diukur menggunakan pendekatan output, artinya pendapatan nasional sama dengan jumlah semua nilai tambah pada perekonomian atau sama dengan nilai semua barang jadi yang dihasilkan dalam perekonomian. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep Produk Domestik Bruto pada hakikatnya merupakan ukuran mengenai kemampuan suatu Negara dalam menghasilkan barang dan jasa selama periode tertentu (Sukirno, 2004).

Produk Domestik Bruto dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Seperti yang dijelaskan oleh Mankiw (2000) sebagai berikut:

- Produk Domestik Bruto Nominal, Produk Domestik Bruto yang perhitungan nilai barang dan jasanya berdasarkan pada harga berlaku.

- Produk Domestik Bruto Riil, Produk Domestik Bruto yang perhitungan nilai barang dan jasanya berdasarkan pada harga kosntan. GDP rill menunjukkan perubahan pendapatan nasional ketika jumlah output berubah tetapi harga tidak.

Penilaian prestasi pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan menghitung Produk Domestik Bruto rill, selanjutnya pertumbuhan ekonomi dilihat dari persentase pertambahan PDB rill yang berlaku dari periode ke periode selanjutnya (Sukirno, 2004).

#### **b. Nilai Tukar/Kurs**

Nilai tukar atau kurs valuta asing didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Sukirno, 2004). Menurut pendapat Lipsey et. al. (1992, h. 484) nilai tukar atau exchange rate juga dapat didefinisikan sebagai “harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang lain, atau klaim atas mata uang tersebut, dapat dibeli dan dijual”.

Para ekonom membedakan kurs menjadi 2, yaitu: kurs nominal dan kurs rill. Kurs nominal (*nominal exchange rate*) adalah harga relatif dari mata uang dua negara, sedangkan kurs rill (*real exchange rate*) adalah harga relatif dari barang-barang kedua negara (Mankiw, 2000). Sukirno (2004) menjelaskan, pada dasarnya terdapat dua cara di dalam menentukan kurs valuta asing:

- 1) Penentuan kurs berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas.
- 2) Penentuan kurs berdasarkan kebijakan pemerintah.

Nilai tukar erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan luar negeri, karena dalam perdagangan luar negeri, pembayarannya dilakukan dengan satu mata uang yang telah disepakati bersama. Salah satu pihak harus menukarkan mata uangnya menjadi mata uang yang telah disepakati. Sebagai mata uang lunak (*softcurrency*), Rupiah Indonesia masih sangat terpengaruh oleh mata uang yang lebih kuat, terutama Dollar Amerika. Pergolakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika mempunyai dampak yang cukup besar bagi kegiatan perekonomian Indonesia di pasar dunia. Kaminsky dan Reinhart (1999) menyatakan bahwa depresiasi (penurunan) tak terduga nilai tukar mata uang domestik mengancam profitabilitas bank dan kinerja NPF.

### **c. Inflasi**

Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur Tingkat Inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Menurut Badan

Pusat Statistik, IHK merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK Indonesia dihitung dengan rumus Laspeyres termodifikasi. Dalam penghitungan rata-rata harga komoditas, ukuran yang digunakan adalah rata-rata aritmatik, tetapi untuk beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, bensin, dan sebagainya digunakan rata-rata geometri.

Dalam menyusun IHK, data harga konsumen diperoleh dari 82 kota, mencakup antara 225-462 barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olahraga; serta transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Setiap kelompok terdiri dari beberapa sub kelompok dan dalam setiap sub kelompok terdapat beberapa komoditas. Lebih jauh, komoditas-komoditas tersebut memiliki beberapa kualitas atau spesifikasi. Beberapa pasar tradisional, pasar modern, dan outlet di setiap kota dipilih untuk mewakili harga-harga dalam kota tersebut.

Menurut UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi UU No.3 Tahun 2004 tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai

Rupiah (pasal 7). Dari pasal tersebut dapat diketahui kejelasan peran Bank Sentral dalam perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia dapat fokus dalam pencapaian tujuannya. Faktor-faktor yang memengaruhi inflasi yaitu tekanan yang berasal dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dalam hal ini, BI memiliki kemampuan memengaruhi tekanan yang berasal dari sisi permintaan. Karena itu, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah maupun swasta. Nopirin (2011) mendefinisikan Inflasi sebagai proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus.

Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan Inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi. Istilah Inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

#### **d. Suku Bunga (Acuan BI Rate)**

Bank Indonesia mendefinisikan *BI Rate* sebagai suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan

moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Soebagio (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan pada Bank Umum Komersial” (Studi Empiris pada Sektor Perbankan di Indonesia) melakukan analisis pengaruh berbagai faktor baik makro maupun mikro. Sebagai variabel dependen digunakan rasio NPL,

sedangkan variabel independennya adalah kurs, inflasi, GDP, CAR, KAP, tingkat bunga pinjaman bank dan LDR. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa diantara ketiga variabel makroekonomi, GDP pengaruhnya tidak signifikan, sedangkan kurs dan inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPL. Sedangkan hasil pengujian terhadap variabel mikroekonomi menunjukkan KAP mempunyai pengaruh paling kuat diantara ketiga variabel mikroekonomi lainnya.

Rahmawulan (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Perbandingan Faktor Penyebab *Non Performing Loan* (NPL) dan *NonPerforming Financing* (NPF)”. Hasil dari perhitungan metode tersebut adalah variabel yang menjadi faktor terjadinya NPL lebih cepat merespon fluktuasi pertumbuhan GDP daripada variabel yang menjadi faktor terjadinya NPF. Faktor – faktor yang mempengaruhi NPL diantaranya pertumbuhan GDP pada 4 *quarter* sebelumnya, dan variabel inflasi, LDR, dan SBI. Sedangkan pada perbankan syariah faktor yang mempengaruhi NPF adalah pertumbuhan GDP 4 *quarter* sebelumnya dan inflasi 3 *quarter* sebelumnya.

Poetry dan Sanrego (2011) “Analisis Pengaruh Variabel Makro dan Mikro terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah.” Dalam penelitian ini penulis ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi NPL dan NPF ditinjau dari variabel makro ekonomi dan variabel mikro ekonomi berupa kondisi internal perbankan baik dalam

jangka panjang maupun jangka pendek. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai kurs USD (ER), Indeks Produk Industri, lalu pada sektor perbankan konvensional digunakan variabel SBI, LDR, dan CAR dengan NPL sebagai variabel terikatnya, sedangkan pada perbankan syariah digunakan variabel SBIS, FDR, dan CAR dengan NPF sebagai variabel terikatnya.

Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat indikasi Inflasi dan SBI berpengaruh positif terhadap NPL, sedangkan variabel nilai tukar, GDP, LDR dan CAR berpengaruh negatif terhadap NPL. Variabel GDP dan CAR berpengaruh positif terhadap NPF, sedangkan nilai tukar, inflasi, SBIS dan FDR berpengaruh negatif terhadap NPF. Sedangkan pada variabel yang memiliki kontribusi terbesar terhadap NPF perbankan syariah adalah kondisi mikroekonomi internal perbankan syariah yaitu FDR perbankan syariah.

Dalam penelitian Iqbal (2008) yang berjudul “Perbandingan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh GDP Riil, Tingkat Suku Bunga Riil, *Growth Financing Rate*, DPK, *Market share* terhadap NPF dan NPL. Hasil dari penelitian ini adalah *Growth Financing Rate* mempengaruhi NPF dan NPL. NPF 3 bulan sebelum dan 9 bulan sebelum berpengaruh negatif terhadap NPF di waktu sekarang, sehingga akan menurunkan risiko NPF di waktu sekarang. Sedangkan NPL 3 bulan sebelum berpengaruh positif

terhadap pembiayaan bermasalah sekarang, sehingga akan meningkatkan risiko NPL di masa depan. Pada perbankan syariah peningkatan DPK menurunkan risiko terjadinya NPF sedangkan pada perbankan konvensional DPK tidak mempengaruhi terjadinya NPL. Pada perbankan syariah *market Share* tidak berpengaruh terhadap risiko terjadinya NPF.

Putri (2014) pada penelitian dengan judul “ Analisis Pengaruh CAR, FDR, Inflasi, dan SBIS Terhadap *NonPerforming Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009:1 – 2013:5.” Dalam penelitian ini variabel NPF digunakan sebagai variabel terikat sedangkan variabelnya CAR, FDR, inflasi, dan SBIS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Error Correction Model* (ECM). Hasil dari penelitian ini adalah variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat keyakinan 95% terhadap NPF. Variabel FDR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap NPF. Variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Variabel SBIS berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat keyakinan 90% terhadap NPF. Dan semua variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap NPF.

Katmas (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Volume Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.” Dalam penelitian ini digunakan total volume pembiayaan sebagai variabel terikat sedangkan variabel bebasnya adalah CAR, NPF, FDR, ROA, BOPO, inflasi, BI rate, dan kurs. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ErrorCorrection Model* (ECM).

Dalam jangka pendek variabel inflasi berpengaruh positif sedangkan dalam jangka panjang variabel inflasi dan BI rate berpengaruh positif dan signifikan pada volume pembiayaan perbankan syariah. Sementara pada variabel internal variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka pendek maupun panjang, sedangkan variabel CAR, NPF, FDR, dan BOPO berpengaruh negatif signifikan dalam jangka panjang maupun pendek terhadap volume pembiayaan perbankan syariah.

Dalam penelitian Febrianti (2015), yang berjudul “ Analisis Pengaruh Pertumbuhan GDP, Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah.” Dalam penelitian ini digunakan NPL dan NPF sebagai variabel terikat sedangkan variabel pertumbuhan GDP, inflasi, BI rate, dan nilai tukar sebagai variabel bebasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Error Correction Model* (ECM).

Dalam penelitian Fajriati (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah (2009:1 - 2015:5)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Variabel faktor eksternal kurs tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 95% dan memiliki pengaruh negatif terhadap NPF. Variabel faktor eksternal SWBI tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 95% dan memiliki pengaruh positif terhadap NPF. Variabel faktor eksternal inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap NPF pada tingkat kepercayaan 95%. Variabel faktor internal

FDR berpengaruh signifikan dan positif terhadap NPF pada tingkat kepercayaan 95%. Variabel faktor internal CAR tidak terlalu berpengaruh signifikan dan negatif terhadap NPF pada tingkat kepercayaan 90%. Dalam hasil uji F variabel eksternal (kurs, SWBI, dan inflasi) dan variabel internal (FDR dan CAR) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel NPF.

Dalam penelitian Rustika (2016) menunjukkan bahwa (1) Variabel Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* dengan koefisien regresi sebesar -0,361 dan signifikansi 0,267. (2) BI Rate masuk dalam *excluded variables*. (3) Nilai Tukar (IDR/USD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* dengan koefisien regresi sebesar 0,126 dan signifikansi 0,040. (4) GDP berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* dengan koefisien regresi sebesar 0,046 dan signifikansi 0,0206. (5) Hasil Uji Koefisien Determinasi dalam penelitian ini memperoleh nilai (Adjusted R<sup>2</sup>) adalah 15,8%.

Saba et. al. (2012). “Analisis sensitivitas dari NPL terhadap indikator makroekonomi di US”, Amerika dengan menggunakan data time series dari tahun 1984 sampai dengan 2010. Penelitian ini menggunakan rasio NPL sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah *Real GDP perCapita*, Tingkat Suku Bunga dan *Total Loans*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara statistik ketiga variabel signifikan, dimana *real GDP per capita* dan tingkat suku bunga

menunjukkan hubungan negatif, sementara *total loans* menunjukkan hubungan positif. Namun, secara matematis hanya variabel tingkat suku bunga yang signifikan.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Hubungan dengan Variabel Dependen
1	Subagio (2005)	<u>Dependen : NPL</u> Kurs Inflasi GDP KAP CAR TBPB LDR	+ + Berpengaruh lemah Berpengaruh Berpengaruh Berpengaruh Berpengaruh lemah
2	Rahmawulan (2008)	<u>Dependen :NPF</u> GDP Inflasi SBI FDR	Berpengaruh + Berpengaruh lemah Berpengaruh
3	Poetry dan Sanrego (2011)	<u>Dependen : NPF</u> SBIS FDR CAR Kurs Inflasi	+ + + + Paling berpengaruh
4	Iqbal (2008)	<u>Dependen : NPF</u> GDP Suku bunga DPK <i>Market Share</i> <i>Growth</i> <i>Financing Rate</i>	- + Tidak berpengaruh Tidak berpengaruh Berpengaruh
5	Putri (2014)	<u>Dependen : NPF</u> CAR FDR Inflasi SBIS	+ + - +

6	Katmas(2014)	<u>Dependen : NPF</u> CAR FDR BOPO ROA BI rate Inflasi Kurs	- - - + + + -
7	Febrianti (2015)	<u>Dependen : NPF</u> GDP Inflasi BI rate Nilai Tukar	Berpengaruh + + +
8	Fajriati (2016)	<u>Dependen : NPF</u> Kurs SWBI Inflasi FDR CAR	- + - + -
9	Rustika (2016)	<u>Dependen : NPF</u> Inflasi BI Rate Kurs GDP	- + + +
10	Saba et. al. (2012)	<u>Dependen : NPL</u> PDB Suku Bunga Total Kredit	+ + -

#### D. Kerangka Penellitian

Risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian / ketidakstabilan bank sebagai akibat tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun *conterparty* lainnya (Ali, 2006). Dengan adanya risiko tersebut, bank harus lebih peka untuk mengetahui risiko pembiayaan hal-hal yang dicurigai akan menimbulkan kerugian berupa naiknya pembiayaan bermasalah sehingga bank dapat melakukan kebijakan pengendalian dengan tepat agar tidak terjadinya ketidakstabilan bank tersebut.

Berdasarkan landasan teori, konsep, dan penelitian terdahulu, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan empat variabel makroekonomi yang diduga berpengaruh terhadap risiko pembiayaan pada BPR Syariah yang ada di Indonesia. Adapun variabel independen tersebut adalah Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), Nilai Tukar (Kurs) Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, Inflasi, dan Suku Bunga. Sedangkan pada variabel dependen menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF)

- 1) Hubungan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai dari barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian suatu negara dalam satu tahun tertentu. PDB dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam mengukur dan melihat produktivitas perekonomian suatu negara. Ketika PDB meningkat, dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan pada pendapatan nasional. Hal ini tentu juga menjelaskan kinerja para pelaku ekonomi yang menyediakan barang dan jasa. Ketika pendapatan para pelaku ekonomi yang menjadi nasabah meningkat, maka kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya yakni mengembalikan pembiayaan yang diberikan bank akan meningkat pula.

Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya risiko atas pembiayaan yang diberikan perbankan syariah akan berkurang dan dapat

memicu menurunnya angka pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini angka pembiayaan bermasalah diproksikan dengan rasio *NonPerforming Financing*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka PDB berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*.

## 2) Hubungan Kurs terhadap *Non Performing Financing*(NPF)

Kurs merupakan salah satu harga yang lebih penting dalam perekonomian terbuka, karena ditentukan oleh adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, mengingat pengaruhnya yang besar bagi neraca transaksi berjalan maupun bagi variabel-variabel Makro Ekonomi ekonomi lainnya. Kurs dapat dijadikan alat untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Nilai mata uang yang stabil menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik atau stabil (Salvator, 1997:10). Fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terutama ketika terjadi depresiasi akan meningkatkan pembiayaan impor yang kemudian meningkatkan biaya produksi.

Depresiasi merupakan kondisi dimana nilai tukar mata uang rupiah mengalami penyusutan atau penurunan atau pelemahan (nilai rupiah semakin tinggi terhadap dolar Amerika Serikat) yang disebabkan adanya mekanisme perdagangan. Adanya pelemahan nilai mata uang rupiah ini dapat berpengaruh pula pada penurunan pendapatan. Ketika depresiasi mata uang IDR/USD terjadi, maka muncul kemungkinan nasabah mengalami kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan yang

diberikan bank syariah. Posisi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, terutama pada kondisi pelemahan nilai mata uang rupiah, harus dikendalikan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah yang dalam hal ini diukur dengan rasio *Non Performing Financing*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Nilai Tukar IDR/USD berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing*.

### 3) Hubungan Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Bank Indonesia, Inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi. Kenaikan harga-harga ini memberikan tekanan pada ekonomi masyarakat terutama bagi mereka yang menjadi debitur (*mudharib*) perbankan syariah.

Jika inflasi terjadi pada saat pendapatan masyarakat tetap atau menurun, maka hal ini dapat memperparah risiko pembiayaan yang dihadapi perbankan syariah, sebab kemampuan pengembalian pembiayaan oleh debitur turut menurun. Sebelum inflasi terjadi, seorang debitur sanggup untuk membayar angsurannya. Ketika inflasi, harga-harga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sedangkan penghasilan debitur tersebut tidak mengalami peningkatan. Kemampuan debitur dalam

membayar angsuran menjadi melemah sebab sebagian besar atau bahkan seluruh penghasilannya sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai akibat dari harga-harga yang meningkat (Mutamimah dan Chasanah, 2012). Maka peningkatan Inflasi dapat meningkatkan risiko pembiayaan yang dihadapi perbankan syariah, dalam hal ini diproksikan oleh rasio *NonPerforming Financing*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Inflasi berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing*.

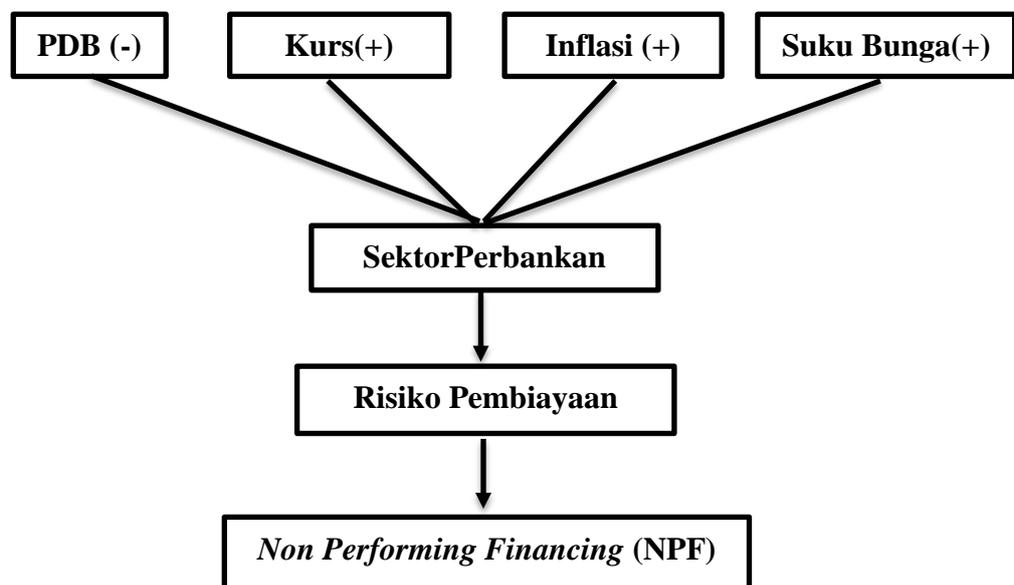
#### 4) Hubungan Suku Bunga terhadap *Non Performing Financing*(NPF)

Suku bunga merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang sangat berpengaruh pada sektor perbankan. Tingkat suku bunga yang tinggi bisa digunakan sebagai instrumen untuk menurunkan jumlah uang beredar di masyarakat. Kenaikan BI Rate yang diikuti dengan kenaikan suku bunga kredit bank dapat menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah sebab beban bunga yang harus ditanggung debitur akan semakin berat. Meskipun Bank Syariah tidak mengenal system bunga dan kegiatan operasionalnya, namun baik bank syariah dan bank konvensional sebagai lembaga bisnis maka menghadapi persaingan di industry perbankan.

Saat BI Rate naik dan berpengaruh terhadap peningkatan suku bunga pinjaman pada bank konvensional hal tersebut menguntungkan perbankan syariah karena marginnya akan semakin bersaing dengan bank konvensional, sehingga saat margin bagi hasil bank syariah semakin

kompetitif maka pembiayaan akan meningkat. Margin bagi hasil bank syariah yang lebih kompetitif terhadap bank konvensional dapat berdampak pada kenaikan permintaan pembiayaan bank syariah, maka saat terjadi kenaikan permintaan pembiayaan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Febrianti menunjukkan bahwa BI Rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *Non Performing Financing* Pada Bank Syariah di Indonesia.

Berdasarkan alur pemikiran seperti yang diuraikan diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
Kerangka Penelitian

## **E. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah dimana kebenarannya perlu diuji. Berdasarkan penelitian terdahulu dari penelitian ini, berikut adalah hipotesis dalam penelitian, diantaranya :

1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto berpengaruh negatif (-) dan signifikan terhadap variabel *non performingfinancing* BPR syariah.
2. Kurs berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap variabel *non performingfinancing* BPR syariah.
3. Suku Bunga berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap variabel *non performingfinancing* BPR syariah.
4. Inflasi berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap variabel *non performingfinancing* BPR syariah.